KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1152-4733-7839-9738

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.309113/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(04)	Ditjen Badan Peradilan Agama
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(309113)	PENGADILAN AGAMA BIMA
Sebesar	:	Rp. 241.000.000	(DUA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	241.000.000
005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	241.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	241.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B I M A (071) Rp. 241.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1152-4733-7839-9738

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Program	:	005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				241.000.000
Kegiatan	:	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				241.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhdapan dengan Hukum				
		2. 01	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan				
		3. 01	Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan				
		4. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama				
		5. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama				
		6. 03	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama				
		7. 04	Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama				
		8. 05	Jumlah pihak beperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal				
		9. 06	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		960,00	Orang	96.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.003	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	(PN)	960.00	Orang	96.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		320,00	Perkara, Berkas Perkara	145.000.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	(PN)	200.00	Perkara	70.000.000
		02 QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	(PN)	120.00	Perkara	75.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025

DS:1152-4733-7839-9738

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (04)	Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker	: (309113)	PENGADILAN AGAMA BIMA

								Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	241.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	241.000.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1152-4733-7839-9738

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309113	**PENGADILAN AGAMA BIMA**	**-**	**241.000**	**-**	**-**	**-**	**241.000**		
005.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**241.000**	**-**	**-**	**-**	**241.000**		
1053	**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**	**-**	**241.000**	**-**	**-**	**-**	**241.000**		
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	96.000	-	-	-	96.000	23 . 06	
	(23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)								
01	RM	-	96.000	-	-	-	96.000	071	
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	145.000	-	-	-	145.000	23 . 06	
	(23.06 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. DOMPU)								
01	RM	-	145.000	-	-	-	145.000	071@	
	JUMLAH	**-**	**241.000**	**-**	**-**	**-**	**241.000**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1152-4733-7839-9738

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**309113**	**PENGADILAN AGAMA BIMA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.087	241.000
		BELANJA BARANG	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.087	241.000
	005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.087	241.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.087	241.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.335	171.954
		- PNBP (425233)	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.607	67.240
		- PNBP (425239)	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.728	104.714

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025
IV A. B L O K I R

DS:1152-4733-7839-9738

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
309113	**PENGADILAN AGAMA BIMA**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	66.750		
	52 Belanja Barang	Rp.	66.750		
005.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
1053	**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**				
1053.QCA	**Perkara Hukum Perseorangan**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	63.000		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2025
IV B. C A T A T A N

DS:1152-4733-7839-9738

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004